

**DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk laporan tahunan sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang, yaitu Pemerintah Kota Samarinda. Laporan kinerja tahunan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama tahun 2023.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan kami. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.

Samarinda, 29 Februari 2024



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN	1
B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS	17
C. RENCANA STRATEGIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. PENETAPAN TUJUAN	27
B. PENETAPAN SASARAN	27
C. KEBIJAKAN	28
D. PROGRAM	29
E. KEGIATAN	30
F. SUB KEGIATAN	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	41
1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2023	43
2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Tahun 2022	44

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	45
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan	46
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
B. REALISASI ANGGARAN	50
BAB IV PENUTUP	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Tenaga ASN, PPPK dan Non ASN	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2023	18
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan	
Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2023	18
Tabel 1.3. Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
di Kota Samarinda Tahun 2023	19
Tabel 1.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda	21
Tabel 1.5. Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	
Kota Samarinda Tahun 2021-2023	22
Tabel 1.6. Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas	
di Kota Samarinda 2023	23
Tabel 2.1. Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda	28
Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Arah Kebijakan	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda	29
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	
Kota Samarinda Tahun 2023	30
Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023	32

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	
Kota Samarinda Tahun 2023	43
Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan	
Tahun 2022 dan 2023	44
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan	
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	
Yang Terdapat Dalam Renstra	45
Tabel 3.4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023	46
Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Indikator Kinerja	49
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam Rangka	
Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada	
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023	50
Tabel 3.7. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam mencapai	
Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Kesehatan	
Tahun 2023.....	51



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Beberapa ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan

Fungsional;

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas

- kesehatan;
- d. Penerbitan izin bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
- g. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, keputakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;

- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- d. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan verifikasi SPP;
- f. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- h. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. menyusun neraca keuangan Dinas;
- k. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- l. menyusun laporan keuangan dinas;
- m. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan; memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- b) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan Kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

merumuskan kebijakan, bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- d) penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- e) penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;

- f) penyiapan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan wabah/ klb;
- i) penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit potensial wabah;
- j) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

- b. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dilingkungan Dinas Kesehatan Samarinda terdapat UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;
- b. UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meliputi:
 - 1) UPTD Puskesmas Trauma Center Kelas A;
 - 2) UPTD Puskesmas Air Putih Kelas A;
 - 3) UPTD Puskesmas Baqa Kelas A;
 - 4) UPTD Puskemas Bengkuring Kelas A;
 - 5) UPTD Puskemas Juanda Kelas A;
 - 6) UPTD Puskemas Karang Asam Kelas A;
 - 7) UPTD Puskemas Lempake Kelas A;
 - 8) UPTD Puskemas Loa Bakung Kelas A;
 - 9) UPTD Puskemas Mangkupalas Kelas A;

- 10) UPTD Puskemas Palaran Kelas A;
- 11) UPTD Puskemas Pasundan Kelas A;
- 12) UPTD Puskemas Remaja Kelas A;
- 13) UPTD Puskemas Sambutan Kelas A;
- 14) UPTD Puskemas Segiri Kelas A;
- 15) UPTD Puskemas Sempaja Kelas A;
- 16) UPTD Puskemas Sidomulyo Kelas A;
- 17) UPTD Puskemas Sungai Siring Kelas A;
- 18) UPTD Puskemas Temindung Kelas A;
- 19) UPTD Puskemas Wonorejo Kelas A;
- 20) UPTD Puskemas Sungai Kapih Kelas A;
- 21) UPTD Puskemas Harapan Baru Kelas A;
- 22) UPTD Puskemas Makroman Kelas A;
- 23) UPTD Puskemas Bukuan Kelas A;
- 24) UPTD Puskemas Bantuas Kelas A;
- 25) UPTD Puskemas Samarinda Kota Kelas A; dan
- 26) UPTD Puskemas Lok Bahu Kelas A

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan uji laboratorium sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan yang

diarahkan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

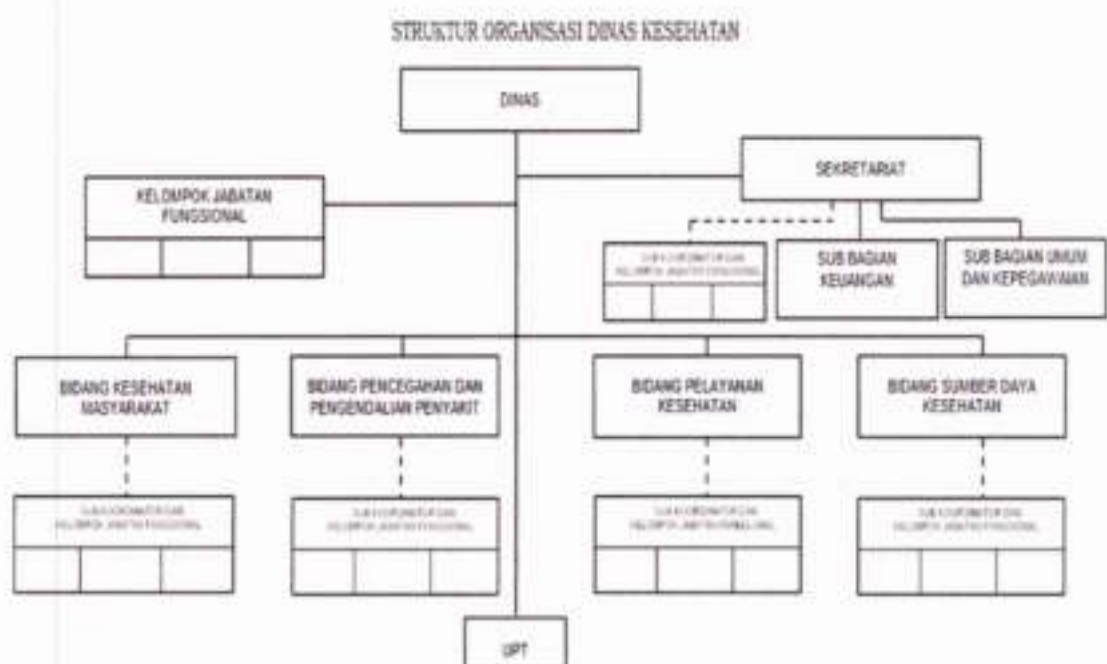
- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standard pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologic, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patalogi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- g. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- h. pemeliharaan peralatan laboratorium;
- i. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja)

dilaboratorium dan mengelola limbah laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;

- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :



1. Sumber Daya Manusia

Gambaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seluruh Puskesmas mempunyai tenaga medis, tenaga kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga perawat gigi, tenaga laboratorium dan asisten apoteker namun untuk tenaga apoteker jauh masih kurang dan sangat diperlukan khususnya pada pelayanan puskesmas 24 jam atau puskesmas rawat inap. Sampai saat ini jumlah tenaga ASN di

lingkungan Dinas Kesehatan Kota 775 orang, tenaga PPPK sebanyak 44 dan tenaga Non ASN sebanyak 394 orang sehingga bila ditotal mencapai 1.213 orang.

Tabel 1.1.
Jumlah Tenaga ASN, PPPK dan Non ASN
Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2023

No	Tenaga	Jumlah
1.	ASN	775
2.	PPPK	44
2.	Non ASN	394
Jumlah		1.213

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2023

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	II	1	0	1
2	III	1	4	5
3	IV	13	18	31

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan, di dukung dengan sarana dan prasarana. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Samarinda dapat dilihat pada daftar tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.3.
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Pelayanan Kesehatan	Total
1	Rumah Sakit Umum	10
2	Rumah Sakit Khusus	6
3	Puskesmas Perawatan	6
4	Puskesmas Non Perawatan	20
5	Balai Pengobatan / Klinik	100
6	Polindes	4
7	Posyandu	693

C. RENCANA STRATEGIS

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, yakni :
"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"
 maka Dinas Kesehatan bertekad untuk turut serta dalam upaya menunjang dan mensukseskan pembangunan dan pengembangan Kota Samarinda. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah Menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan merupakan Langkah awal untuk melaksanakan penjabaran dari

Misi ke 1 (satu) Kota Samarinda yaitu, "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA".

Dalam mewujudkan Misi ke 1 (satu) Kota Samarinda maka Dinas Kesehatan mempunyai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan - Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

Anggaran untuk pelaksanaan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5.
Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kota Samarinda Tahun 2021-2023

No	Jenis Sumber Pembiayaan	Jumlah Alokasi		
		2021	2022	2023
1	APBD Kota	316.538.901.840	365.844.399.798	416.112.240.997
2	APBD Provinsi	-	-	-
3	APBN (DAK Fisik/Non Fisik)	42.053.119.290	22.909.753.750	34.857.654.658
Total		358.592.021.130	388.754.153.548	450.969.895.655

Penyebaran puskesmas disetiap kecamatan di Kota Samarinda merata. Kondisi persebaran puskesmas di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6.
Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas
di Kota Samarinda 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Puskesmas
1	Palaran	221.29	5	3
2	Samarinda Seberang	12.49	6	2
3	Loa Janan Ilir	26.13	5	2
4	Sungai Kunjang	43.04	7	4
5	Samarinda Ulu	22.12	8	4
6	Samarinda Kota	11.12	5	1
7	Samarinda Ilir	17.18	5	1
8	Sambutan	100.95	5	3
9	Samarinda Utara	229.52	8	6
10	Sungai Pinang	34.16	5	2
JUMLAH		718.00	59	27

Analisis Aspek Strategis

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai unit kerja Pemerintah Kota Samarinda memiliki tugas pokok dan fungsi Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Beberapa isu strategi yang dihasilkan untuk mencapai visi misi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu:

a. Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan mengutamakan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Meningkatnya kinerja dan pelayanan.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi sehingga menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan, data dan informasi kesehatan merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan yaitu proses manajemen, pengambilan keputusan, pemerintahan dan penerapan akuntabilitas.

Adapun permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda antara lain :

1. Kurangnya tenaga kesehatan yang didistribusikan ke Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, masih belum merata pendistribusian tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas, masih banyak tenaga kesehatan yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan untuk keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan.
3. Kurangnya anggaran peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sehingga masih banyak tenaga kesehatan yang kesulitan ikut UKOM atau kenaikan pangkat.

Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2023
2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2023 dengan Tahun 2022
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN TUJUAN

Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu ***"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"***. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan sumber daya kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan selalu memprioritaskan peningkatan mutu layanan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah. Berdasarkan hasil revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan melihat keterkaitan serta implementasi dengan visi misi yang ada, maka Dinas Kesehatan Kota Samarinda menetapkan tujuan ***"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Samarinda"***

B. PENETAPAN SASARAN

Sasaran yang dimaksud pada Perjanjian Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Sasaran yang ada pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda kemudian diidentifikasi sebagai sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 – 2026 beserta Indikator Kinerja, Target Capaian dan Program/Kegiatan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda ada 2 (dua) yaitu :

1. Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan.

Didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk;
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun penetapan sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

C. KEBIJAKAN

Arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Samarinda menjadi dasar untuk penetapan strategi dan arah kebijakan untuk dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Kota Samarinda.

Berikut rumusan pernyataan Sasaran, Indikator Kinerja dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tabel 2.2.
Sasaran, Indikator Kinerja dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN
1	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
			Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

D. PROGRAM

Rencana Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda berisi program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah, maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana indikatif yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah, termasuk dalam penjabarannya atas kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Terdapat 5 program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

E. KEGIATAN

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda menetapkan kegiatan operasional tahun 2023 yaitu sebanyak 20 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pelayanan BLUD

F. SUB KEGIATAN

Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas didalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda menetapkan sub kegiatan operasional tahun 2023 yaitu sebanyak 127 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
		Pengembangan Rumah Sakit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baqa)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Air Putih)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)
		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)

	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		BOK SALUR PUSKESMAS
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PROGRAM PENUNJANG	Perencanaan, Penganggaran, dan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baqa)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA. MOEIS)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : sasaran, indikator kinerja, target Program dan Kegiatan serta Anggaran, sedangkan satuan pengukuran kinerja masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase, orang, rupiah, buah, hari, unit dan sebagainya.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja di awal tahun ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
81 – 100	Tercapai / Berhasil
61 – 80	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
41 – 60	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
< 40	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda disampaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2023 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang kemudian dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2023 sebagai berikut :

1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2023

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,48	87,27%
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	83,43	103,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu tergolong dalam kriteria "Tercapai/Berhasil". Pada sasaran pertama tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata terdapat indikator kinerja rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,55 dan terealisasi 0,48 atau capaian realisasi 87,27%. Rasio tersebut bukan merupakan pencapaian yang buruk, mengingat fasilitas kesehatan di Kota Samarinda terus dilengkapi dengan penyediaan Klinik, Rumah Sakit dan praktek dokter, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat pada puskesmas saja.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kinerja dan pelayanan terdapat indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian yang ditargetkan pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 80,30 dan terealisasi 83,43 sehingga capaian realisasinya 103,90%.

2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.2.
Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
	2022	2023	2022	2023
Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,50	0,48	94,34	87,27
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	83,43	103,62	103,90

Dari table diatas maka dapat dianalisis realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui pada tahun 2022 sampai dengan 2023 realisasi kinerja pada indikator rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 0,02. Diketahui capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 94,34% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 87,27%.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan tabel diatas diketahui pada tahun 2022 sampai dengan 2023 realisasi kinerja pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan sebesar 2,40. Diketahui capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 103,62% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 103,90%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah RENSTRA 2021-2026
1	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	rasio	0,48	0,55
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	83,43	80,30

Dari tabel tersebut, maka dapat dianalisis kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra, yaitu sebagai berikut :

a. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk

Berdasarkan tabel diatas, diketahui rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2023 terealisasi 0,48 dari target jangka menengah sebesar 0,55. Hal ini bukan merupakan pencapaian yang buruk, mengingat fasilitas kesehatan di Kota Samarinda terus dilengkapi dengan penyediaan Klinik, Rumah Sakit dan praktek dokter, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat pada puskesmas saja.

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 terealisasi 83,43 dari target jangka menengah sebesar 80,30. Hal ini memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus berupaya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat walaupun masih banyak kendala-kendala dalam melakukan pelayanan tersebut untuk kemudian akan dilakukan evaluasi dengan harapan kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pelayanan yang dilakukan sehingga akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pelayanan akan lebih optimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Tabel 3.4.
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interval Realisasi Kinerja (%)			
					81-100	61-80	41-60	<40
1	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,48	87,27%	√			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	83,43	103,90%	√			

Adapun yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

a. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Adapun fungsinya antara lain sebagai pusat pelayanan kesehatan primer keterjangkauan dan kemudahan akses ke sarana pelayanan kesehatan tersebut sangat diperlukan sebab akan mempengaruhi keberhasilan puskesmas dalam melaksanakan fungsinya.

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat secara umum oleh indikator rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Jumlah Puskesmas di Kota Samarinda tahun 2022 tercatat sebanyak 26 buah. Terdiri dari 20 Puskesmas Non Rawat Inap dan 6 Puskesmas Rawat Inap. Rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kota Samarinda sebesar 1 : 31.970, hal ini masih dibawah target Nasional sebesar 1 : 30.000. Rasio ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan dua Puskesmas, hal ini disebabkan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Puskesmas di Kota Samarinda. Namun rasio tersebut bukan merupakan pencapaian yang buruk, mengingat fasilitas kesehatan di Kota Samarinda terus dilengkapi dengan penyediaan Rumah Sakit dan praktek dokter, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat pada puskesmas dan klinik saja.

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan public secara berkala. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2023 sebesar Rp 450.969.895.655,- dibandingkan tahun lalu alokasi anggaran mengalami kenaikan. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Anggaran dalam pencapaian sasaran pertama tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata dengan indikator kinerja rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar Rp 149.187.807.469,- dan anggaran dalam pencapaian sasaran kedua meningkatnya kinerja dan pelayanan dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yaitu sebesar Rp 301.782.088.157,- dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	Rp 149.187.807.469
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Rp 301.782.088.157
JUMLAH				Rp 450.969.895.655

B. Realisasi Anggaran

Gambaran distribusi alokasi anggaran untuk setiap indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2023 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam Rangka Pencapaian
Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	149.187.807.469	120.334.699.755	80,66
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	301.782.088.157	282.409.627.041	93,58
Total			450.969.895.655	402.744.326.796	89,31

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai target sasaran strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja pada Dinas Kesehatan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,55	0,48	87,27%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145,930,068,498	117,718,525,164	80,67
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,219,509,176	37,469,717,530	81,07
						Pembangunan Puskesmas	16,247,800,000	12,462,002,800	76,70
						Pengembangan Rumah Sakit	600,000,000	287,065,750	47,84

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4,013,127,000	3,995,289,750	99,56
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250,000,000	249,136,500	99,65
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250,000,000	240,289,000	96,12
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8,621,417,500	7,815,978,722	90,66
						Pengadaan Obat, Vaksin	9,984,265,084	6,689,650,772	67,00
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,683,159,592	5,327,686,026	93,75
						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12,240,000	-	0

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150,000,000	-	0
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257,500,000	253,803,600	98,56
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	150,000,000	148,814,610	99,21

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,377,819,322	79,957,456,000	80,46
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	554,221,120	546,579,916	98,62
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148,240,000	148,239,900	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154,878,400	154,590,300	99,81
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	178,164,800	177,498,000	99,63
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	166,557,400	161,586,383	97,02

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	541,322,456	540,432,280	99,84
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150,000,000	149,735,000	99,82
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1,261,796,341	1,107,054,420	87,74
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2,138,477,858	2,116,753,708	98,98
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	565,892,222	563,629,893	99,60
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,138,810,109	1,687,750,532	53,77

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1,373,479,420	1,363,993,252	99,31
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50,000,000	49,999,000	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50,000,000	30,483,000	60,97
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,871,198,000	1,863,946,906	99,61
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,000,000	39,149,000	78,30

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	239,350,000	239,256,400	99,96
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	313,222,000	312,099,000	99,64
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100,000,000	92,930,561	92,93
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	397,425,000	396,740,955	99,83
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80,080,000	78,598,100	98,15
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100,000,000	98,347,900	98,35
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25,000,000	24,930,000	99,72

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,768,251,856	4,086,757,822	85,71
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47,243,505,850	36,095,034,400	76,40
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50,000,000	49,983,800	99,97
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	785,000,000	721,319,709	91,89
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500,000,000	474,352,000	94,87
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7,344,873,713	7,272,357,227	99,01
						Operasional Pelayanan Puskesmas	421,983,777	421,983,777	100

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)	130,000,000	129,998,450	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)	130,000,000	129,983,600	99,99
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)	130,000,000	127,780,000	98,29
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	130,000,000	130,000,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)	130,000,000	129,687,000	99,76

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)	130,000,000	129,993,425	99,99
						Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Air Putih)	130,000,000	130,000,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)	130,000,000	128,777,725	99,06
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	130,000,000	129,533,500	99,64

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)	130,000,000	129,400,000	99,54
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)	130,000,000	129,636,500	99,72
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	130,000,000	130,000,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)	130,000,000	128,968,500	99,21

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	130,000,000	130,000,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	130,000,000	129,698,650	99,77
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	130,000,000	125,462,025	96,51
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	130,000,000	117,585,950	90,45

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Sempaja)	130,000,000	129,454,000	99,58
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	130,000,000	126,431,395	97,25
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	130,000,000	129,880,600	99,91
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)	130,000,000	129,505,800	99,62

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)	130,000,000	129,779,525	99,83
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)	130,000,000	125,489,000	96,53
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)	130,000,000	129,983,750	99,99
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)	130,000,000	129,949,800	99,96
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	130,000,000	123,595,000	95,07

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300,000,000	286,488,536	95,50
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	465,895,000	302,247,540	64,87
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	376,350,000	376,190,024	99,96
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	35,000,000	34,992,000	99,98
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5,500,000,000	4,835,787,702	87,92
						BOK Salur Puskesmas	14,558,844,000	9,715,062,862	66,73

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	200,000,000	198,900,384	99,45
						Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100,000,000	99,720,209	99,72
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,000,000	99,180,175	99,18
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132,740,000	92,451,250	69,65
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50,000,000	21,925,000	43,85

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	57,740,000	52,232,250	90,46
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25,000,000	18,294,000	73,18
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,273,645,000	1,676,372,137	73,73
						Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100,000,000	99,806,237	99,81

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50,000,000	50,000,000	100
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50,000,000	49,806,237	99,61
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	674,550,000	524,493,500	77,75
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000	50,000,000	100

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	400,000,000	399,957,500	99,99
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	224,550,000	74,536,000	33,19
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,499,095,000	1,052,072,400	70,18
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,499,095,000	1,052,072,400	70,18

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	497,716,000	458,613,850	92,14
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,148,000	61,525,000	71,42
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,148,000	61,525,000	71,42

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230,450,000	219,089,850	95,07
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230,450,000	219,089,850	95,07

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	181,118,000	177,999,000	98,28
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181,118,000	177,999,000	98,28
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	486,378,000	481,188,604	98,93
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151,450,000	146,427,804	96,68

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	151,450,000	146,427,804	96,68
						Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303,178,000	303,010,800	99,94
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250,080,000	249,935,300	99,94
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	53,098,000	53,075,500	99,96

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,750,000	31,750,000	100
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31,750,000	31,750,000	100
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,30	0	0%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301,782,088,157	282,409,627,041	93,58
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000	99,240,000	99,24

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	49,360,000	98,72
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	29,880,000	99,60
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	100
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146,708,411,969	145,169,149,237	98,95
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125,770,540,749	125,769,326,432	100
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20,887,871,220	19,350,140,505	92,64
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,682,300	99,36

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,193,429,150	1,104,256,487	92,53
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,998,000	5,997,775	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000	494,389,000	98,88
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129,981,200	87,402,400	67,24
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	48,279,500	96,56
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,799,950	50,288,775	98,99
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,050,000	16,043,525	99,96
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	92,000,000	53,994,000	58,69

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348,600,000	347,861,512	99,79
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210,000,000	206,470,000	98,32
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210,000,000	206,470,000	98,32
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,909,997,788	5,734,438,412	97,03
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,949,417,888	4,870,363,012	98,40
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,579,900	66,748,000	60,36

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850,000,000	797,327,400	93,80
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620,741,750	434,894,496	70,06
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	44,975,000	44,950,500	99,95

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	149,848,750	137,638,646	91,85
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	234,358,000	97,365,000	41,55
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	191,560,000	154,940,350	80,88
						Peningkatan Pelayanan BLUD	147,039,507,500	129,661,178,409	88,18

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	11,050,000,000	7,428,024,282	67,22
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)	596,171,364	607,770,824	101,95
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)	4,186,814,865	3,461,920,140	82,69
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)	2,145,724,088	1,952,557,271	91
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	1,948,447,398	1,667,599,396	85,59

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA. MOEIS)	114,258,304,788	102,962,027,143	90,11
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)	2,528,030,586	2,030,448,237	80,32
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)	2,690,103,602	2,703,863,852	100,51
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)	955,679,548	882,885,656	92,38
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)	1,523,704,893	1,400,850,568	91,94

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	922,641,199	852,348,717	92,38
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)	1,790,142,073	1,279,819,620	71,49
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)	2,443,743,096	2,431,062,702	99,48
						TOTAL	450,969,895,655	402,744,326,796	89,31

Beberapa penyebab dari keberhasilan tersebut diatas antara lain :

1. Dukungan anggaran untuk pengentasan kesehatan di wilayah Kota Samarinda;
2. Kolaborasi Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan yang menunjang keberhasilan kesehatan;
3. dukungan dari pemerintah dan masyarakat stunting dan penguatan program kesehatan masyarakat;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda semuanya berjalan bersinergi;
5. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

Beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian tersebut antara lain :

1. Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Masih kurangnya tenaga medis di puskesmas dan masih kurang keterampilan/meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan sesuai tugasnya;
3. Masih banyak tumpang tindis tugas pada tenaga kesehatan di Puskesmas sehingga konsentrasi tugas terbagi;
4. Masih banyak tenaga kesehatan yang perlu di bimtek/pelatihan sesuai tugas terkendala anggaran untuk pelatihan bimbingan teknis kurang memadai;
5. Belum berprosesnya pohon kinerja, Cascading antar unit belum berjalan maksimal, Crosscutting OPD yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kerjanya belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

1. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;
2. Mengadakan pelatihan/Bimtek kepada tenaga kesehatan agar lebih terampil sesuai tugasnya;
3. Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;
4. Meningkatkan promosi kesehatan betapa pentingnya hidup sehat dengan baliho, reklame, panflet, dan lain-lain yang dapat mudah diakses masyarakat;
5. Penambahan anggaran di bidang Sumber Daya Kesehatan untuk pelatihan/Bimtek tenaga kesehatan yang professional;
6. Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPT Dinas Kesehatan lebih ditumbuhkan;
7. Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas.



BAB 4

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Samarinda berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian yang ditargetkan pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 80,30 dan terealisasi 83,43 sehingga capaian realisasinya 103,90%. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,55 dan terealisasi 0,48 atau capaian realisasi 87,27%. Capaian anggaran dalam pencapaian sasaran pertama meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 80,66% dan capaian anggaran dalam pencapaian sasaran kedua meningkatnya kinerja dan pelayanan dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yaitu sebesar 93,58%.

Beberapa penyebab dari keberhasilan tersebut diatas antara lain:

1. Dukungan anggaran untuk pengentasan kesehatan di wilayah kota samarinda.
2. Kolaborasi Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan yang menunjang keberhasilan kesehatan.
3. dukungan dari pemerintah dan masyarakat stunting dan penguatan program kesehatan masyarakat.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda semuanya berjalan bersinergi.
5. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

Beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian tersebut antara lain :

1. Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan Masih kurangnya tenaga medis di puskesmas dan masih kurang keterampilan/meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan sesuai tugasnya.
2. Masih banyak tumpang tindis tugas pada tenaga kesehatan di Puskesmas sehingga konsentrasi tugas terbagi.
3. Masih banyak tenaga kesehatan yang perlu di bimtek/pelatihan sesuai tugas terkendala anggaran untuk pelatihan bimbingan teknis kurang memadai.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan.

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

1. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Mengadakan pelatihan/Bimtek kepada tenaga kesehatan agar lebih terampil sesuai tugasnya.
3. Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan promosi kesehatan betapa pentingnya hidup sehat dengan baliho, reklame, panflet, dan lain-lain yang dapat mudah diakses masyarakat.
5. Penambahan anggaran di bidang Sumber Daya Kesehatan untuk pelatihan/Bimtek tenaga kesehatan yang professional.
6. Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPT Dinas Kesehatan lebih ditumbuhkan.
7. Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja tahun 2023 dibuat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Irmid Kusasih
NIP. 196809111998031009



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606

E-MAIL : up_dkk@yahoo.com

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. ANDI HARUN

Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2023

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda**


dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Walikota Samarinda


Dr. ANDI HARUN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021 – 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			TARGET SASARAN						SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terjaminnya Akses Masyarakat Pembangunan kesehatan yg berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	persentase cakupan jaminan kesehatan Semesta/Universal/ Health Coverage	%	UU No 36 thn 2009 pasal 20 ayat 1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata (indikator kinerja : rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk)	jumlah peserta JKN / jumlah penduduk x 100	99	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan BPJS
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang Terakreditasi	%	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022	meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	jumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi/jumlah seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah x 100	65	67	71	84	93	100	Dinas Kesehatan

Samarinda, 12 Januari 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
1.	Terjaminnya Akses Masyarakat Pembangunan kesehatan yg berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	persentase cakupan jaminan kesehatan Semesta/Universal/Health Coverage	persen	100	99,76	99,76%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145,930,068,498	117,718,525,164	80.67%
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,219,509,176	37,469,717,530	81.07%
							Pembangunan Puskesmas	16,247,800,000	12,462,002,800	76.70%
							Pengembangan Rumah Sakit	600,000,000	287,065,750	47.84%
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4,013,127,000	3,995,289,750	99.58%
							Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250,000,000	249,136,500	99.65%
							Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250,000,000	240,289,000	96.12%
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alet Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8,621,417,500	7,815,978,722	90.66%
							Pengadaan Obat, Vaksin	9,984,265,084	8,689,650,772	87.00%
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,683,159,592	5,327,686,026	93.75%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12,240,000	-	0.00%
							Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150,000,000	-	0.00%
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257,500,000	253,803,600	98.56%
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	150,000,000	148,814,610	99.21%
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,377,819,322	79,957,456,000	80.46%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	554,221,120	548,579,916	98.62%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148,240,000	148,239,900	100.00%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154,876,400	154,590,300	99.81%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	178,164,800	177,498,000	99.63%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	166,557,400	161,586,383	97.02%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	541,322,456	540,432,280	99.84%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150,000,000	149,735,000	99.82%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1,261,796,341	1,107,054,420	87.74%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2,138,477,858	2,116,753,708	98.98%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	565,892,222	563,629,893	99.60%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,138,810,109	1,687,750,532	53.77%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1,373,479,420	1,363,993,252	99.31%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50,000,000	49,999,000	100.00%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50,000,000	30,483,000	60.97%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,871,198,000	1,863,946,906	99.61%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,000,000	39,149,000	78.30%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	239,350,000	239,258,400	99.96%
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	313,222,000	312,099,000	99.64%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100,000,000	92,930,561	92.93%
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	397,425,000	396,740,955	99.83%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80,080,000	78,598,100	98.15%
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100,000,000	98,347,900	98.35%
							Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25,000,000	24,930,000	99.72%
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,768,251,856	4,086,757,622	85.71%
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47,243,505,850	36,095,034,400	76.40%
							Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50,000,000	49,963,800	99.97%
							Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			#DIV/0!
							Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	785,000,000	721,319,709	91.89%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500,000,000	474,352,000	94.87%
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7,344,873,713	7,272,357,227	99.01%
							Operasional Pelayanan Puskesmas	421,983,777	421,983,777	100.00%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)	130,000,000	129,998,450	100.00%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)	130,000,000	129,983,600	99.99%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)	130,000,000	127,780,000	98.29%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baga)	130,000,000	130,000,000	100.00%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)	130,000,000	129,687,000	99.76%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)	130,000,000	129,993,425	99.99%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Air Pubh)	130,000,000	130,000,000	100.00%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)	130,000,000	128,777,725	99.06%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	130,000,000	129,533,500	99.64%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)	130,000,000	129,400,000	99.54%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)	130,000,000	129,638,500	99.72%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	130,000,000	130,000,000	100.00%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)	130,000,000	128,968,500	99.21%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	130,000,000	130,000,000	100.00%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	130,000,000	129,698,650	99.77%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	130,000,000	125,462,025	96.51%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	130,000,000	117,585,950	90.45%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)	130,000,000	129,454,000	99.58%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	130,000,000	126,431,395	97.25%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	130,000,000	129,880,600	99.91%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)	130,000,000	129,505,800	99.62%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)	130,000,000	129,779,525	99.83%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)	130,000,000	125,489,000	96.53%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)	130,000,000	129,983,750	99.99%
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)	130,000,000	129,949,800	99.96%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	130,000,000	123,595,000	95.07%
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300,000,000	286,488,536	95.50%
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	465,895,000	302,247,540	64.87%
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	376,350,000	376,190,024	99.96%
							Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	35,000,000	34,992,000	99.98%
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5,500,000,000	4,835,787,702	87.92%
							BOK SALUR PUSKESMAS	14,558,844,000	9,715,062,862	66.73%
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	200,000,000	198,900,384	99.45%
							Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100,000,000	99,720,209	99.72%
							Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,000,000	99,180,175	99.18%
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132,740,000	92,451,250	69.65%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Keles C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50,000,000	21,925,000	43.65%
							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	57,740,000	52,232,250	90.46%
							Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25,000,000	18,294,000	73.18%
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,273,645,000	1,676,372,137	73.73%
							Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100,000,000	99,806,237	99.81%
							Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50,000,000	50,000,000	100.00%
							Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50,000,000	49,806,237	99.61%
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	674,550,000	524,493,500	77.75%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000	50,000,000	100.00%
							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	400,000,000	399,957,500	99.99%
							Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	224,550,000	74,536,000	33.19%
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,499,095,000	1,052,072,400	70.18%
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,499,095,000	1,052,072,400	70.18%
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	497,716,000	458,613,850	92.14%
							Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,148,000	61,525,000	71.42%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,148,000	61,525,000	71.42%
							Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230,450,000	219,089,850	95.07%
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230,450,000	219,089,850	95.07%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	181,118,000	177,999,000	98.28%
							Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181,118,000	177,999,000	98.28%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	486,378,000	481,188,804	98.93%
							Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151,450,000	146,427,804	96.68%
							Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	151,450,000	146,427,804	96.68%
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303,178,000	303,010,800	99.94%
							Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250,080,000	249,935,300	99.94%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	53,098,000	53,075,500	99.96%
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,750,000	31,750,000	100.00%
							Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31,750,000	31,750,000	100.00%
2.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	persen	84	79.06	94%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301,782,088,157	282,409,627,041	93.58%
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000	99,240,000	99.24%
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	49,360,000	98.72%
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	29,880,000	99.60%
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	100.00%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145,708,411,969	145,169,149,237	98.95%
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125,770,540,749	125,769,326,432	100.00%
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20,887,871,220	19,350,140,505	92.64%
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,682,300	99.36%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,193,429,150	1,104,256,487	92.53%
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,998,000	5,997,775	100.00%
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000	494,389,000	98.88%
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129,981,200	87,402,400	67.24%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	48,279,500	96.58%
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,799,950	50,288,775	98.99%
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,050,000	16,043,525	99.98%
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	92,000,000	53,994,000	58.69%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348,600,000	347,861,512	99.79%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210,000,000	206,470,000	98.32%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210,000,000	206,470,000	98.32%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,909,997,788	5,734,438,412	97.03%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,949,417,888	4,870,383,012	98.40%
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,579,900	66,748,000	60.36%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850,000,000	797,327,400	93.80%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620,741,750	434,894,496	70.06%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	44,975,000	44,950,500	99.95%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	149,848,750	137,638,648	91.85%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	234,358,000	97,365,000	41.55%
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	191,560,000	154,940,350	80.88%
							Peningkatan Pelayanan BLUD	147,039,507,500	129,861,178,409	88.18%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinas Kesehatan Kota Samarinda)	11,050,000,000	7,428,024,282	67.22%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)	696,171,364	607,770,824	101.96%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)	4,186,814,885	3,481,920,140	82.69%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)	2,145,724,088	1,952,557,271	91.00%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baga)	1,948,447,398	1,667,598,398	85.59%

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAQU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA, MOEIS)	114,258,304,788	102,962,027,143	90.11%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)	2,528,030,586	2,030,448,237	80.32%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)	2,690,103,602	2,703,863,852	100.51%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)	955,679,548	882,885,658	92.38%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)	1,523,704,893	1,400,850,568	91.94%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	922,641,199	852,348,717	92.38%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)	1,790,142,073	1,279,619,620	71.49%
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)	2,443,743,096	2,431,062,702	99.48%
							TOTAL	450,969,895,655	402,744,326,796	89.31%